TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR: 97/G/2013/ PTUN.SBY TENTANG KTUN BERANTAI YANG MENJADI OBYEK SENGKETA TUN

(Studi Kasus Terhadap Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo)

Nurul Habibah

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, nurbi_227@yahoo.co.id

Abstrak

Pada tanggal 4 Juni 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan Surat Keputusan No. 03/BPD.K/VI/2013 Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Kepala Desa Terpilih sesuai dengan hasil perhitungan suara oleh panitia Pilkades. Surat Keputusan BPD tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat, untuk kemudian Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kades Terpilih. Pihak yang kalah dalam pilkades yang bernama Suwadi keberatan dengan Surat Keputusan tersebut, karena dianggap permasalahan pelanggaran dalam pilkades belum diselesaikan oleh BPD. Suwadi menggugat surat tersebut ke PTUN Surabaya tertanggal 11 juni 2013

Surat Keputusan BPD yang merupakan KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai tersebut diterima sebagai obyek sengketa tata usaha negara oleh hakim PTUN Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah KTUN berantai dapat dijadikan obyek sengketa TUN dan apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah suatu perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar melakukan pemecahan masalah.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai tidak dapat dijadikan obyek sengketa TUN dalam PTUN. Adapun hasil yang kedua adalah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut belum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: KTUN berantai, Obyek Sengketa TUN.

Abstract

On June, 4th 2013, Badan Permusyawaratan Desa in Keper village, Krembung subdistrict, Sidoarjo district issued decree Number. 03/BPD.K/VI.2013 concerning the proposal of the dismissal of the head village and determination of the chosen candidate according to the result of the calculation of the votes by the election committee of head village election. The BPD's decree that was delivered to the head of regency through the head of subdistrict, then the head of regency should issued a decree regarding the ratification of appointment of an elected head village. The party who lost in the election of the village named Suwadi proposed an objection to the BPD's decree because of the perceived problem violations in the election of head village have not been resolved by BPD. Suwadi sued the decree to a state administrative court of Surabaya on June, 11th 2013.

The BPD's decree which still requires approval from the head of regency was accepted as the object of a dispute by the judge in state administrative court of Surabaya. The based on this fact, then the principal problems in this research are if the decision is still requires approval can it be used as an object of dispute in state administrative court and whether judicial consideration of the judge in making the verdict case is in a compliance to the law. This research uses normative juridical approach, with statute approach to solve the problems.

From the results it can be concluded that BPD's decree which still needs agreement from head of regency could not be used as object of state adiministrative dispute. The second result is Juridical consideration of the judge in the verdict is not based on prevailing law.

Keywords : *KTUN Berantai*, Object of State Administrative Dispute

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (yang selanjutnya disebut BPD).

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Pilkades) oleh penduduk setempat. Pilkades merupakan bentuk perwujudan penyaluran aspirasi politik masyarakat dalam membentuk pemerintahan desa. Demokrasi dalam konteks Pilkades ini dapat dipahami sebagai bentuk sikap partisipasi dari masyarakat dalam mewujudkan demokrasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.

Kinerja pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan peraturan desa mendapat pengawasan dari BPD. Keberadaan BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa (yang selanjutnya disebut

PP Desa), BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Pasal 34 PP Desa juga menjelaskan bahwa fungsi dari BPD ialah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD yang merupakan badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa.

Anggota BPD sesuai dengan ketentuan pasal 30 PP Desa, adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Keanggotaan BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Berdasarkan pasal 30 ayat (3) PP Desa, masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya pada pasal 32 PP Desa mengatur tentang jumlah anggota BPD yang harus ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

Tata cara penyelenggaraan pilkades juga diatur dalam PP Desa, namun dalam konteks pelaksanaan Pilkades di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (yang selanjutnya disebut Perda No.11 tahun 2006). Dalam pasal 2 ayat (1) Perda No.11 tahun 2006 menyebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses pilkades, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pada pasal 2 ayat (2) Perda No.11 tahun 2006 disebutkan bahwa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pilkades kepada BPD. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan. Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka dan Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. Surat Keputusan BPD tentang usulan Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati atau Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih. Bupati atau Walikota menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pada tanggal 19 Mei 2013, berlangsung pilkades, di desa Keper, kecamatan Krembung, kabupaten Sidoarjo, yang calon nomor urut satu bernama Suwadi, dan nomor urut dua adalah Jamaludin Kusen. Dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana di atas diperoleh hasil perhitungan suara terbanyak oleh Ahmad Jamaludin Kusen dengan perolehan suara 980 suara, sedangkan Suwadi memperoleh suara sebanyak 978 suara, sehingga hasil perhitungan selisihnya 2 suara. Sedangkan suara tidak sah sebanyak 29 suara dan daftar pemilih berjumlah 2108 suara.

Setelah dilakukan perhitungan surat suara, ada salah satu calon yaitu Suwadi yang tidak menerima hasil perhitungan suara, hal tersebut dikarenakan Suwadi menduga terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh calon kepala desa nomor urut 2, yaitu saudara Ahmad Jamaludin Kusen yang melakukan manipulasi pemilih yang berada diluar wilayah Desa Keper, Kecamatan Krembung, kabupaten Sidoarjo. Pada tanggal 20 Mei 2013 BPD mengeluarkan surat pernyataan yang pada pokoknya tidak akan menetapkan calon terpilih sampai permasalahan pengaduan pelanggaran selesai dan tuntas

Pada tanggal 4 Juni 2013, BPD mengeluarkan surat keputusan Nomor 03/BPD.K/VI/2013 tentang usulan pemberhentian Kepala Desa dan penetapan calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan hasil perhitungan suara. Sesuai pasal 29 Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006, Surat Keputusan BPD tersebut disampaikan kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan oleh Bupati Sidoarjo. Pihak Suwadi tidak terima dengan Surat Keputusan tersebut, karena dianggap permasalahan pelanggaran belum diselesaikan oleh BPD. Oleh karena itu pihak Suwadi menggugat Surat Keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) tertanggal 11 Juni 2013.

Inti dari surat gugatan menyatakan bahwa keputusan Badan Permusyawaratan Desa mengeluarkan surat Nomor 03/BPD.K/VI/2013 tentang usulan pemberhentian Kepala Desa dan penetapan calon Kepala Desa terpilih, bertentangan dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hakim PTUN dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Surat Keputusan BPD yang merupakan KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai itu merupakan obyek sengketa di PTUN. Dalam amar Putusan PTUN No. 97/G/2013/PTUN.Sby mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Suwadi kepada BPD.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai tentang dapat dijadikannya KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN Berantai sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 97/G/2013/PTUN.Sby, dengan dua rumusan masalah yaitu apakah KTUN berantai dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang digugat ke PTUN dan apakah pertimbangan majelis hakim mengenai KTUN berantai dapat dianggap obyek sengketa TUN dalam putusan Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dengan adanya gugatan Suwadi yang menggugat Surat Keputusan BPD desa Keper, kecamatan Krembung, kabupaten Sidoarjo No. 03/BPD.K/VI/2013 tentang usulan pemberhentian Kepala Desa dan penetapan calon Kepala Desa terpilih ke PTUN Surabaya. Sesuai dengan pasal 29 Perda No. 11 tahun 2006 menyatakan bahwa Keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat keputusan yang dikeluarkan BPD masih memerlukan persetujuan dari Bupati dalam pelaksanaannya, sehingga Surat Keputusan BPD tersebut dapat dikatakan sebagai KTUN yang masih memerlukan persetujuan, yang pada Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dalam pengecualian KTUN yang dimaksud pada pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan teori pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu teori preventif, Bupati sebagai pejabat pengawas dari BPD, mempunyai wewenang dalam memberikan persetujuan atau membatalkan Surat Keputusan BPD tersebut. Dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan BPD ada kemungkinan mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh Bupati, yang berarti bahwa Surat Keputusan BPD masih belum final dan belum dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak terkait.

Pada faktanya, PTUN Surabaya menerima permohonan gugatan yang diajukan oleh Suwadi. Dalam amar putusannya PTUN Surabaya mengabulkan gugatan Suwadi dan membatalkan Surat Keputusan BPD, desa Keper, kecamatan Krembung, kabupaten Sidoarjo Nomor 3/ BPD.K/ 2013 tertanggal 4 juni 2013 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, mengenai kasus-kasus yang telah diputus, dalam hal ini adalah kasus pilkades desa Keper kecamatan Krembung kabupaten Sidoarjo yang sudah diputus dalam putusan PTUN Surabaya No. 97/G/2013/PTUN. Sby. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dengan cara dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti serta dengan mencari artikel, jurnal dan hasil penelitian hukum selanjutnya akan dilihat apakah dalam substansinya mengandung persoalan tentang masalah yang akan diteliti, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis untuk memecahkan permasalahan penelitian.

Teknik pengolahan bahan hukum terdiri dari melakukan studi kepustakaan, identifikasi dan melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelola bahan-bahan hukum yang ada untuk selanjutnya dilakukan analisis, yang menggunakan pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemaparan Duduk Perkara

Pada tanggal 19 Mei 2013 berlangsung pilkades, desa Keper kecamatan Krembung

kabupaten Sidoarjo, dengan calon nomor urut satu bernama Suwadi dan calon nomor urut dua bernama Jamaluddin Kusen. Dalam pilkades tersebut diperoleh hasil perhitungan suara dengan rincian, Ahmad Jamaludin Kusen memperoleh 980 suara sedangkan Suwadi memperoleh 978 suara, suara tidak sah sebanyak 29 suara dan daftar pemilih sebanyak 2108 suara. Setelah dilakukan perhitungan surat suara oleh panitia pilkades tersebut, ada salah satu calon yaitu Suwadi yang tidak terima dengan hasil perhitungan surat suara karena diduga terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Ahmad Jamaludin Kusen dalam pilkades tersebut.

Tanggal 20 Mei 2013 BPD mengeluarkan surat pernyataan yang pada pokoknya tidak akan menetapkan calon terpilih sampai permasalahan pengaduan pelanggaran selesai dan tuntas. Pada tanggal 4 Juni 2013, BPD mengeluarkan surat keputusan nomor 03/BPD.K/VI/2013 tentang usulan pemberhentian Kepala Desa dan penetapan calon Kepala Desa terpilih, sesuai dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan panitia pilkades.

Sesuai dengan pasal 29 Perda Kabupaten Sidoarjo No. 11 Tahun 2006, Surat Keputusan BPD tentang usulan pemberhentian Kepala Desa dan penetapan calon Kepala Desa terpilih tersebut disampaikan kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan oleh Bupati Sidoarjo. Kepala Desa terpilih berdasarkan Surat Keputusan BPD tersebut disahkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian keputusan BPD.

Suwadi keberatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan BPD tersebut karena dianggap permasalahan pelanggaran dalam pilkades belum selesai. Pihak Suwadi menggugat Surat Keputusan BPD tersebut ke PTUN Surabaya tertanggal 11 Juni 2013. Inti dari surat gugatan menyatakan bahwa Surat Keputusan BPD nomor 03/BPD.K/VI/2013 tentang pemberian usulan pemberhentian Kepala Desa dan penetapan calon Kepala Desa terpilih tersebut, telah bertentangan dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Permohonan Penggugat

Penggugat memohon agar PTUN Surabaya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I Dalam penundaan

Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat dan menetapkan penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan BPD, Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Nomor 03/BPD.K/VI/2013 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Terpilih Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo atas nama Ahmad Jamaluddin Kusen hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

II Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan BPD, Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Nomor 03/BPD.K/VI/2013 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo atas nama Ahmad Jamaluddin Kusen.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BPD, desa Keper, kecamatan Krembung, kabupaten Sidoarjo atas nama Ahmad Jamaluddin Kusen.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Permohonan Tergugat Dalam Eksepsi

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Surabaya agar berkenan memutuskan:

I Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur lebel) dan prematur.

II Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

I Dalam Eksepsi

1. Menimbang, bahwa di dalam obyek sengketa khususnya pada bagian memutuskan kedua diperoleh fakta hukum

bahwa Tergugat telah menetapkan Kepala Desa Terpilih periode Tahun 2013-2019 atas nama Sdr. Ahmad Jamaluddin Kusen sekaligus mengusulkan untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Keper kepada Bupati Sidoarjo.

2. Menimbang, bahwa Pasal 29 Perda Sidoarjo No. 11 Tahun 2006, pada pokoknya mengatur bahwa keputusan BPD tentang penetapan Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa untuk disahkan oleh Bupati.
3. Menimbang bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka Surat Keputusan BPD merupakan rangkaian keputusan yang merupakan syarat untuk diterbitkannya surat keputusan Bupati mengenai pengesahan Kepala Desa Terpilih atau biasa disebut sebagai keputusan berantai (*Ketting Beschikkingen*).
4. Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa aquo merupakan KTUN yang bersifat berantai (*Ketting Beschikkingen*) dengan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pengangkatan Kepala Desa Keper dimana masing-masing dari surat keputusan berantai tersebut adalah surat keputusan yang telah memenuhi unsur sebagai KTUN yaitu bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi Penggugat.
5. Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dibuktikan jika tidak ada surat keputusan obyek sengketa aquo, maka Sdr. Ahman Jamaludin Kusen tidak akan dapat diproses pengesahannya melalui surat Keputusan Bupati Sidoarjo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah bersifat prematur oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak diterima.

Analisis

1. KTUN Yang Masih Memerlukan Persetujuan Atau KTUN Berantai Dijadikan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Digugat Ke PTUN

Pengertian sengketa tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 10 UU Peratun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum

perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat (individu), tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan yang merasa dirugikan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

Pengertian KTUN berdasarkan pasal 1 angka 9 UU Peratun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan rumusan pengertian KTUN di atas, dapat ditarik unsur-unsur utama yang harus dipenuhi oleh suatu KTUN, yaitu:

- a) KTUN merupakan suatu penetapan tertulis

Istilah penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian, karena penetapan tertulis saja yang dapat digugat ke PTUN.

- b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Peratun 1986 j.o pasal 1 angka 8 UU Peratun 2009 adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada bagian penjelasan pasal 1 angka 3 UU Peratun 1986 memberikan penjelasan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

- c) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan hukum yang berlaku

Penjelasan pasal 1 angka 3 UU Peratun 1986 menjelaskan tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau

kewajiban pada orang lain. Menurut Indroharto, tindakan hukum tata negara yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum, kalau suatu tindakan hukum pemerintahan (KTUN) itu tidak menimbulkan suatu akibat hukum, maka tindakan itu (seperti memberikan penjelasan secara tertulis) bukan merupakan suatu tindakan hukum, dengan sendirinya lalu tidak mungkin merupakan suatu KTUN menurut pengertian pasal 1 angka 9 UU Peratun 2009.¹ Tindakan hukum tata usaha negara itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam dan dimungkinkan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

d) Bersifat konkret, individual dan final

KTUN harus bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. KTUN harus bersifat individual artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. KTUN juga harus bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

e) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata

KTUN yang dikeluarkan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata membawa konsekuensi bahwa penggugat harus seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur KTUN tersebut harus dipenuhi dalam terbitnya suatu KTUN. Tidak terpenuhinya unsur-unsur KTUN di atas, menyebabkan jika KTUN tersebut merugikan pihak-pihak tertentu tidak dapat digugat di PTUN. KTUN yang dapat digugat ke PTUN selain dalam pasal 1 angka 9 tahun 2009 adalah KTUN pada pasal 3 UU Peratun 1986. Pasal 3 UU Peratun 1986 menentukan bahwa:

- (1). Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan KTUN.

- (2). Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

- (3). Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Sebagai akibat dari adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU Peratun 1986, maka pengertian KTUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU Peratun 2009 mendapat perluasan, karena dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU Peratun 1986 tersebut, dapat diketahui bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan KTUN yang menjadi kewajibannya disamakan dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang telah mengeluarkan KTUN. Dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UU Peratun 1986 di atas dapat diketahui bahwa jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan, badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, padahal mengeluarkan keputusan tersebut merupakan kewajibannya, maka badan atau pejabat tata usaha negara dianggap telah mengeluarkan keputusan yang menolak permohonan.

Pada pasal 2 UU Peratun 1986 j.o UU Peratun 2004 mengatur pengecualian yang memberi batasan-batasan tentang keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak termasuk KTUN dalam pengertian pasal 1 angka 9 UU Peratun 2009. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian KTUN dalam UU Peratun. Salah satu KTUN yang termasuk dalam pengecualian pasal 2 (huruf C) tersebut adalah KTUN yang masih memerlukan persetujuan (Berantai), dalam penjelasan pasal 2 huruf C yang dimaksud dengan KTUN yang masih memerlukan persetujuan ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya KTUN diperlukan persetujuan instansi atasan lebih dahulu, keputusan yang masih

¹ Indroharto, *Op.Cit.*, hlm. 146

memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 9, pasal 2 dan pasal 3 di atas, KTUN yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam PTUN adalah KTUN yang sesuai dengan pasal 1 angka 9 UU Peratun 2009 dan KTUN yang dimaksud dalam pasal 3 UU Peratun 1986. Ketentuan KTUN dalam pasal 2 UU Peratun 1986 j.o UU Peratun 2004 merupakan KTUN yang tidak dapat digugat ke PTUN. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam PTUN, karena dalam pasal 1 angka 9 UU Peratun 2009 tentang penetapan tertulis yang dapat digugat itu hanya keputusan yang sudah final saja, sedangkan keputusan yang masih memerlukan persetujuan jelas masih belum final dan belum menimbulkan akibat hukum.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai KTUN Berantai Dapat Dianggap Obyek Sengketa TUN Dalam Putusan No. 97/G/2013/PTUN.Sby Berdasarkan Hukum Yang Berlaku

a. Pertimbangan hakim tentang Surat Keputusan BPD disebut sebagai keputusan berantai.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 yang pada intinya mengatur bahwa keputusan BPD tentang penetapan Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa untuk disahkan oleh Bupati dan Kepala Desa Terpilih tersebut disahkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. Atas dasar ketentuan pasal 29 tersebut, hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan BPD Nomor 03/BPD.K/VI/2013 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Terpilih Desa Keper merupakan rangkaian keputusan yang merupakan syarat untuk diterbitkannya surat keputusan Bupati mengenai pengesahan Kepala Desa Terpilih atau biasa disebut sebagai keputusan berantai.

Pendapat hakim mengenai Surat Keputusan BPD yang dianggap sebagai keputusan berantai atau KTUN yang masih memerlukan persetujuan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Surat Keputusan BPD tersebut merupakan keputusan berantai (KTUN yang masih memerlukan persetujuan) karena Surat Keputusan BPD tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan Bupati, yang kemudian Bupati mengesahkan Kepala Desa Terpilih dengan surat keputusan Bupati.

b. Pertimbangan Hakim tentang obyek sengketa merupakan KTUN berantai yang telah memenuhi unsur sebagai KTUN yang bersifat konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum.

Hakim peradilan tata usaha negara dalam pertimbangannya berpendapat bahwa surat keputusan yang dikeluarkan BPD merupakan KTUN yang bersifat berantai dengan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pengangkatan Kepala Desa Keper, masing-masing dari surat keputusan berantai tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai KTUN yaitu bersifat konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat.

Berdasarkan pengertian sengketa tata usaha negara dalam pasal 1 angka 10 UU Peratun 2009, sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya suatu KTUN oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal tertentu dapat saja KTUN tersebut dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu. Berdasarkan hal tersebut, obyek sengketa dalam pengadilan tata usaha negara adalah suatu KTUN, KTUN yang dapat digugat yang dimaksud adalah KTUN yang sesuai dengan pasal 1 angka 9 UU Peratun 2009 dan pasal 3 UU Peratun 1986.

Keputusan yang bersifat berantai atau KTUN yang masih memerlukan persetujuan dapat dikatakan belum memenuhi unsur final dan belum bisa menimbulkan akibat hukum, hal ini diperjelas dengan adanya pasal 2 huruf C UU Peratun 2004 yang menyebutkan bahwa KTUN yang masih memerlukan persetujuan merupakan pengecualian KTUN yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut UU Peratun. Meskipun Surat Keputusan BPD tersebut telah memenuhi unsur konkrit dan individual, Surat Keputusan BPD yang belum final tersebut dianggap belum memenuhi unsur-unsur KTUN, karena unsur-unsur tersebut bukan bersifat alternatif tetapi bersifat kumulatif, jika salah satu unsur belum terpenuhi maka KTUN tersebut tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur KTUN sesuai pasal 1 angka 9 UU Peratun 2009.

Berdasarkan bagian penjelasan pasal 2 huruf C UU Peratun 1986, jika terdapat KTUN yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah merugikan, maka KTUN tersebut dapat digugat di Pengadilan Negeri, dengan demikian sesuai penjelasan tersebut Surat Keputusan BPD yang dianggap merugikan oleh Suwadi seharusnya digugat ke Pengadilan Negeri bukan ke PTUN.

Surat Keputusan BPD dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2013, kemudian Suwadi menggugat Surat Keputusan BPD tersebut ke PTUN Surabaya tertanggal 11 Juni 2013. Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Perda No. 11 tahun 2006 menyebutkan bahwa Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam keputusan BPD, disahkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian keputusan BPD. Perda No. 11 tahun 2006 tidak mengatur tentang ketentuan akibat hukum apabila Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tidak mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih.

Pada pasal 3 ayat (1) UU Peratun 1986 terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan KTUN yang menjadi kewajibannya disamakan dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang telah mengeluarkan KTUN, kemudian dalam ketentuan selanjutnya pada ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan, badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, padahal mengeluarkan keputusan tersebut merupakan kewajibannya, maka badan atau pejabat tata usaha negara dianggap telah mengeluarkan keputusan yang menolak permohonan. Jika dikaitkan dengan pasal 3 UU Peratun 1986, maka Bupati apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak menerbitkan surat Keputusan tentang pengesahan Kepala Desa terpilih maka Bupati telah dianggap telah mengeluarkan keputusan. Tetapi Suwadi menggugat keputusan BPD tersebut ketika surat keputusan tersebut belum mendapat pengesahan dari Bupati Sidoarjo dan masih dalam jangka waktu yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) Perda No.11 tahun 2006. Surat Keputusan BPD tersebut apabila dianggap merugikan Suwadi seharusnya digugat ke Pengadilan Negeri bukan ke PTUN.

Hakim PTUN Surabaya yang memutus perkara ini, juga tidak memperhatikan adanya fungsi pengawasan preventif yang dimiliki oleh Bupati Sidoarjo. Dengan adanya pasal 29 ayat (1) Perda Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPD tentang penetapan Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk kemudian disahkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati, hal ini menunjukkan bahwa Bupati Sidoarjo mempunyai fungsi pengawasan preventif sebagai pengawas dari instansi dibawahnya. Pengawasan preventif merupakan bentuk

bentuk pengawasan dimana oleh instansi administrasi atasan atau instansi pengawasnya harus dikeluarkan suatu keputusan yang berisi pemberian persetujuan atau dianggap telah dikeluarkan keputusan demikian itu, sebelum suatu keputusan yang dikeluarkan oleh instansi bawahan atau instansi yang diawasi tersebut dapat bekerja. Sesuai dengan fungsi pengawasan preventif yang dimiliki oleh Bupati Sidoarjo menunjukkan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan BPD Keper belum final dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum karena belum mendapat persetujuan dari Bupati Sidoarjo.

Terkait kewenangan PTUN dalam memutus sengketa Pilkadaes, hingga saat ini PTUN masih memeriksa dan mengadilinya meskipun telah ada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa masalah pilkades merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pilkadaes juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan oleh karenanya keputusan hasil Pilkadaes tidak termasuk pengertian KTUN menurut pasal 2 huruf G UU Peratun 1986. Saat ini yurisprudensi tersebut tidak banyak diikuti karena terhadap masalah Pilkadaes banyak hakim yang berpendapat bahwa obyek gugatannya bukan keputusan panitia pemilihan mengenai hasil Pilkadaes, melainkan keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa. Contoh perkara Pilkadaes yang diputus sebagai kewenangan PTUN adalah Putusan perkara Nomor 16/G/2009/PTUN.SMG tanggal 7 Juli 2009 antara Makruf Bin Sudiran sebagai penggugat melawan Bupati Demak sebagai tergugat.

- c. Pertimbangan hakim mengenai gugatan penggugat tidak bersifat prematur oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait gugatan penggugat kabur dan prematur dinyatakan tidak terima.

Berdasarkan pertimbangan hakim sebelumnya yang menyatakan KTUN berantai merupakan KTUN yang telah memenuhi unsur yang bersifat konkrit, individual dan final, dimana pertimbangan hakim tersebut belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seharusnya eksepsi tergugat diterima oleh majelis hakim PTUN Surabaya karena obyek gugatan yang diajukan penggugat adalah Surat Keputusan BPD yang merupakan KTUN berantai atau KTUN yang masih memerlukan persetujuan, sehingga surat keputusan tersebut

tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam PTUN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab di atas, berikut ini akan disampaikan kesimpulan dari pembahasan penulisan hukum ini:

1. KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai tidak dapat dijadikan obyek sengketa di PTUN, KTUN yang dapat digugat di PTUN adalah KTUN dalam pengertian pasal 1 angka 9 UU Peratun 2009, yang menjelaskan bahwa suatu KTUN harus memenuhi unsur individual, konkret dan final serta menimbulkan akibat hukum.. Hal ini diperjelas lagi melalui pasal 2 huruf C UU Peratun 2009 beserta penjelasannya, KTUN yang masih memerlukan persetujuan tidak dapat digugat ke PTUN, KTUN yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian bagi seorang atau badan hukum perdata dapat digugat ke Pengadilan Negeri.
2. Pertimbangan hukum hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa mengenai Surat Keputusan BPD Keper No. 03/BPD.K/VI/2013 dalam perkara Perkara Tata Usaha Negara Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby. belum sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan hukum peradilan tata usaha negara, KTUN berantai atau KTUN yang masih memerlukan persetujuan tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam PTUN. Seharusnya gugatan penggugat yang menggugat KTUN berantai ditolak oleh Majelis Hakim.

Saran

1. Bagi masyarakat perlu diberikan informasi mengenai prosedur KTUN dalam bidang tertentu sehingga dengan demikian akan mengetahui apakah suatu KTUN sudah final atau belum.
2. Bagi pembentuk Peraturan Daerah Sidoarjo No. 11 tahun 2006 hendaknya mengatur lebih lanjut mengenai akibat hukum apa yang akan muncul, jika Bupati dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih agar tidak terjadi kekosongan hukum. Serta diharapkan kepada hakim di PTUN untuk mempertahankan metode penerapan hukum dan penemuan hukum

dalam setiap mengambil pertimbangan dan putusan atas sutau sengketa tata usaha negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Koentjoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Indroharto, 2003, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Fajar, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Pustaka Belajar.

Hadjon, Philipus et.al, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Tjakra Negara, Soegijatno, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

R. Wiyono, 2013, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga*, Jakarta, Sinar Grafika.

S.F Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.

Soetomo, 1981, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, Malang, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya Malang.

Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Harahap, Zairin, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

KAMUS

Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, hlm.645.

PERATURAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2007 Seri D3)

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5079)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4587)

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E)

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 Seri E)

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 31 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 13 Tahun